



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CUT AHMAD PUTRA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **999955**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.631.440.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/203.88 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.872.600.000
2. Tanah Seluas 20610 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 618.300.000
3. Tanah Seluas 8380 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 251.140.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.071.000.000
6. Tanah Seluas 1255 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 753.000.000
7. Tanah Seluas 718 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 215.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 170.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



3. MOTOR, HONDA VARIO SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	321.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.522.687
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.128.162.687

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.128.162.687

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.